



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 22 Oktober 2018

Halaman: 2

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
 Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 551230, 515865, 562682
 EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
 HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
 WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media Massa : **RADAR** Hari : **SENIN** Tanggal : **22/10-2018** Halaman : **2**

Ingin Tenteram, Warga Tolak APK

Tapi Tetap Gunakan Hak Pilihnya

JOGJA. Masa kampanye Pemilu 2019 sudah mulai sejak 22 September lalu. Tapi suasana kampanye yang identik dengan alat peraga kampanye (APK) gambar calon legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden belum marak. Justru beberapa kampung di Kota Jogja menyatakan menolak wilayahnya dipasang APK.

Seperti warga kampung Surokarsan Merangsan yang memasang spanduk di pintu masuk kampung. Menurut Ketua Asosiasi Ketua RW Surokarsan Kelik Endro Suryono ketidakinginan tersebut datang dari warga, terutama warga RW4, 5,6 dan 7 yang wilayahnya dilalui jalan utama kampung.

Terlebih masyarakat di Surokarsan itu kan sangat mojemuk," kata Kelik kepada Radar Jogja kemarin (21/10). Pemasangan APK dikawatirkan akan memicu perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Tak hanya itu, melihat kondisi jalan sempit yang melewati empat RW tersebut, pemasangan APK justru menciptakan ketidaknyamanan. "Jalanannya rasanya jadi sempak," ucap Kelik. Ia dan warganya tak ingin melihat adanya 'perang' bendera atau umbul-umbul. "Kecuali kalau mereka kampanye dengan menyebarkan brosur atau pamflet gitu, kita nggak masalah," katanya.

APK yang tak diinginkan oleh warga tak hanya berbentuk bendera dan balho, tapi juga tempelan poster. Beberapa warga sempat mengeluhkan adanya tempelan poster di dinding rumahnya tanpa izin. Jika sudah terjadi, Kelik akan meminta partai bersangkutan untuk mencopotnya dengan pendekatan secara baik-baik.

Keinginan serupa juga diutarakan warga RW03 kampung Ngadisuryan Patehan Kraton. Mereka juga memasang spanduk penolakan pemasangan APK di kampungnya. Menurut salah satu warga, Sutarno tujuan pemasangan spanduk tersebut untuk menghindari konflik jelang Pemilu 2019.

"Ini memang sudah kesepakatan warga. Warga pengen kampongnya aman dari konflik, lalu akhirnya ya dibikin himbauan. Takutnya kalau ada yang siri pasang bendera partai ini terus yang situ pasang bendera partai lain, kan rawan konflik," ujarnya.

Sedangkan jika ada yang nekat memasang atribut partai, Sutarno menjelaskan pihak pengurus RT akan memberikan sanksi.

Pemasangan spanduk penolakan APK bukan berarti warga apolitis. "Kalau saya tetap nyoblos, tidak akan golput," tegasnya. (cr5/cr9/pra/zi)

Instansi	Tingkat Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. KPU	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2. Bawaslu	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.			
5.			
6.			

Yogyakarta,
 Ptl. Kepala
 Sekretaris

- 2 -



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005